



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN CIAMIS

Neng Ida¹, Basuki Rahmat²

Program Studi Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Email : neng.ida2018@gmail.com

ABSTRAK

Stunting bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dapat memiliki efek yang sama dan korelasi yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model tata kelola kolaboratif yang menggabungkan berbagai perspektif pemangku kepentingan, publik, dan swasta, serta anggota masyarakat umum, ke dalam proses kolaboratif untuk pencegahan stunting di Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran kualitas deskriptif. Data diperoleh melalui pemanfaatan teknologi untuk observasi, pencatatan, dan penelitian Teknik analisis data yang digunakan meliputi penyuntingan data, pengumpulan data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi kooperatif yang diukur dengan kolaborasi komposisi yakni dalam hal membangun kepercayaan antar peserta pemangku kepentingan, membangun komitmen, berbagi pemahaman tentang tujuan, melaksanakan perencanaan strategis dan melakukan negosiasi dengan sangat baik. Saat ini belum ada forum komunikasi di Pemerintah Kabupaten, dan swasta juga belum ada. Tindakan kolaborasi berbentuk inovasi kegiatan dalam pencegahan menghalangi pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti pengetahuan awamnya tentang menghalangi, tingkat prevalensi menghalangi masih tinggi, jalur menghalangi yang berbahaya dengan kategori jangka pendek yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan jalur jangka panjang yaitu tingkat kecerdasan rendah. Ada sejumlah faktor pendukung, antara lain manusia, alam, dan anggaran. Bentuk tata kelola kolaboratif ini terdiri dari pencegahan stunting dan penurunan sosial. Kolaborasi ini menekankan pada berbagai proses kolaboratif, termasuk keterbukaan dan transparansi. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa proses koordinasi stunting di Kabupaten Ciamis berhasil karena untuk meminimalisir stunting, kepemimpinan Kabupaten Ciamis mengandalkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Stunting, Stakeholder.

ABSTRACT

The problem of stunting cannot be solved by one party alone; instead, significant collaboration is required. Therefore, the aim of this research is to find a collaborative governance model that aims to simplify the complicated process that brings together communities, stakeholders, the private sector, and the government in an effort to stop stunting in Ciamis District. This examination uses a clear subjective exploratory technique. Methods of observation, interviews, and documentation studies were used to collect data. Data reduction, data presentation, and conclusion drawing are also used as data analysis methods. The findings show that collaborative governance processes, which measure trust, commitment, shared goals, strategic planning, and negotiations among stakeholder participants, are highly effective in implementing collaborative governance. However, neither the private sector nor dedicated communication forums exist at the district government level. The lack of knowledge about stunting, the high prevalence of stunting, the harmful effects of stunting in the category of short-term physical growth disorders, and the long-term effects of low levels of intelligence all hinder collaborative action in the form of innovative stunting prevention activities. . Budget, natural resources, and human resources are supporting factors. This collaborative governance has resulted in communities with higher education levels and lower stunting rates. In the form of accountability and a clear pattern, this collaboration results in a collaborative process. Based on the research findings, the authors suggest that the collaboration process for stunting prevention in Ciamis Regency is very good. If the government of Ciamis Regency really wants to reduce the stunting rate, all that is needed is a bigger role of the private sector, more committed stakeholders, and better coordination between stakeholders.

Keywords: Collaborative Governance, Stunting, Stakeholders.

PENDAHULUAN

Indonesia digunakan dalam berbagai bidang yang kompleks, antara lain: masalah sosial, masalah kesehatan dan masalah manajemen dalam pemerintahan. Masalah stunting di Indonesia merupakan

salah satu masalah mendesak yang perlu segera diatasi. Stunting adalah salah satu bentuk gagal tumbuh pada anak, oleh karena itu populer di kalangan pebisnis dan masyarakat umum. Ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mendorong stunting di kalangan masyarakat umum pada umumnya.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dialog antara pejabat pemerintah dan anggota masyarakat sangat penting, begitu pula partisipasi anggota masyarakat umum dalam proses tersebut. Ini untuk memastikan bahwa masyarakat umum mengetahui masalah dan solusinya, serta dilindungi dari bahaya melalui shat, perdamaian dan harmoni. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut peran pemerintah menjadi yang utama. Sebagai hasil dari program pencegahan stunting ini, anggota masyarakat serta presiden saat ini harus aktif untuk mencapai keberhasilan melalui manajemen publik.

Stunting dapat digunakan sebagai alat pengajaran untuk berbagai orang, dengan berbagai alat dan teknik yang digunakan untuk mengajar. Salah satu contohnya adalah persepsi dan pengetahuan tentang stunting dalam Perpres No. 72 Tahun 2021. Ini merupakan bentuk reward atau punishment atas Strategi Nasional dalam merespon deteksi stunting yang terjadi pada tahun 2018.

Tabel 1.1.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat kolaborasi

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	TPPS
1	Badan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Anggota TPPS
2	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	Sekretariat
3	Dinas Kesehatan	Anggota TPPS
4	Dinas Pendidikan	Anggota TPPS
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Anggota TPPS
6	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Anggota TPPS

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 045.4/Kpts.168-Huk/2022

Mungkin ada proses, tantangan, dan hambatannya untuk tugas yang dihadapi dalam kolaborasi. Namun, hal ini dapat berubah jika dilakukan dengan cara yang sama seperti tindakan, perbuatan, atau pengelolaan yang dapat digunakan untuk mendukung gagasan tertentu. Metode yang dijelaskan di sini adalah strategi yang bekerja dengan baik untuk tujuan ini guna meningkatkan sejumlah aspek, seperti komunikasi dan pemahaman antar individu yang sedang mengerjakan suatu proyek.

Melihat dari fenomena blocking ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk diusulkan menjadi sebuah penelitian karena Hinderling ini merupakan keanehan umum dimana mungkin terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia. Maka dari itu, bertitik tolak dari hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “*Collaborative Governance Pada Pencegahan Stunting di Kabupaten Ciamis*”.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Manajemen Publik

Menurut Freemont (Silalahi, 2019) mengemukakan bahwa: “Manajemen digunakan untuk mengkoordinasikan antara individu dan bisnis sumber-sumber untuk mencapai tujuan tertentu. Studi ini menunjukkan bahwa manajemen dapat menerapkan strategi tunggal melalui koordinasi sebagai tim untuk menerapkan berbagai strategi, yang masing-masing dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu..

Manajemen publik menurut Kristiadi (Waluyo, 2007, hal. 119) menyatakan bahwa: “Manajemen publik adalah upaya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya”. Manajemen publik erat kaitanya dengan faktor upaya dalam suatu organisasi dan hubungan dengan masyarakat bagaimana pemerintah

bisa dan mampu untuk melakukan berbagai upaya dan usaha untuk kesejahteraan masyarakat, hidup adil dan Makmur.

b. Penegertian Adminstrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*. Dalam *oxford Advance Learner Dictionary of Current English* (Silalahi, 2018, hal. 2).

Pengertian administrasi menurut J. Wajong (Silalahi, 2018, hal. 5) dalam arti sempit menyatakan bahwa: "Administrasi adalah kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi didalamnya organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan". Definisi tersebut menjelaskan bahwa dengan administrasi maka perlu adanya bukti berupa pencatatan dalam kegiatan apapun sebagai informasi dan untuk diberikan kepada atasan telah terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

Pengertian administrasi publik menurut Waluyo (Waluyo, 2007, hal. 34) menyatakan bahwa : "Administrasi publik merupakan kegiatan yang melibatkan publik (masyarakat), dan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sejak adanya sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik".

c. Pengertian Collaborative Governance

Menurut Ansell and Gash (Islamy, 2018, hal. 1) pengertian Collaborative Governance menyatakan bahwa: " Collaborative governance saat ini digunakan untuk "memenuhi kebutuhan mayoritas dan swasta dalam forum kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang merupakan orientasi konsensus".

Salah satu model tata kelola adalah tata kelola kolaboratif, di mana pemangku kepentingan di luar negara diizinkan untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses formal, berorientasi konsensus, deliberatif untuk membuat, menerapkan, atau meningkatkan barang, program, atau aset publik, tata kelola kolaboratif adalah salah satunya. contoh yang paling umum. Definisi ini mengatakan bahwa tata kelola kolaboratif adalah proses atau upaya yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dikatakan juga bahwa Collaborative Governance adalah suatu proses atau upaya yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dikatakan juga bahwa Collaborative Governance adalah suatu proses atau upaya yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Ansell dan Gash (Islamy, 2018), sebuah makalah penelitian tentang tata kelola kolaboratif menyatakan, "Tata kelola kolaboratif pada hari pertama digunakan untuk mengungkapkan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum publik dengan publik lain untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang orientasi konsensus."

Pengertian *Collaborative governance* menurut Thomson & Perry (Islamy, 2018, hal. 2) menyatakan bahwa:

"*Collaborative governance* dianggap sebagai salah satu cara untuk memecahkan konflik sosial yang kronis antara para pemangku kepentingan yang beragam, merumuskan rencana pembangunan daerah, untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui self-organisasi antar pemangku kepentingan yang kreatif, deliberatif, dan saling menguntungkan".

Dari pernyataan diatas ketika terdapat masalah yang kompleks, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak maka dengan kolaborasi menjadi solusi dan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara merencanakan, dan membuat kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bersama.

d. Proses Kolaborasi

Untuk menjalankan proses kolaborasi, Huxam and Vangen (Islamy, 2018) mengemukakan enam hal penting yaitu :

- a) Goal management (pertemuan, sasaran, dan sasaran); b) Kompromi (dalam bentuk mengubah cara kerja, norma, dan budaya); dan c) Communication (berkomunikasi agar semua orang bisa rukun dan terhindar dari tragedi milik bersama);

- d) Demokrasi dan kesetaraan (menghormati hak semua orang dan mengejar kebahagiaan);
- e) Wewenang dan Kepercayaan (memberi dan berkontribusi kepada perusahaan maupun kepada diri sendiri);
- f) Tekad, komitmen, dan daya tahan (komitmen untuk konsisten dengan keteguhan hati untuk mencapai kesepakatan).

e. Kolaborasi Dalam Perspektif Teori Administrasi Publik

Menurut Kooiman, (Islamy, 2018) menyatakan bahwa:“ Istilah "tata kelola" digunakan untuk merujuk pada proses interaksi kebijakan sosial antara warga negara dan masyarakat umum dalam berbagai konteks, termasuk kebijakan publik dan intervensi publik dalam konteks ini.

f. Keterkaitan Collaborative Governance Dengan Manajemen

Menurut Mary Parker Follet (Waluyo, 2007, hal. 5) menyatakan bahwa: “Manajemen telah diberi batasan sebagai seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang”. Definisi tersebut manajemen selain dipandang sebagai ilmu juga harus ada seni didalamnya ada bentuk pergerakan melalui orang lain. Manajemen menurut Waluyo (Waluyo, 2007:hal 5) menyatakan bahwa: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya organisasi proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Dari pernyataan diatas artinya adalah proses suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan, perencanaan adalah menetapkan seluruh aktivitas, pengorganisasian adalah keseluruhan proses, pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang ditentukan. Pengarahan bagaimana seorang pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahan, agar orang lain melaksanakan tugas-tugas. Pengendalian berarti pemimpin berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak kearah tujuannya.

Menurut Kooiman, (Islamy, 2018) menyatakan bahwa:“ Istilah "tata kelola" digunakan untuk menggambarkan proses interaksi kebijakan sosial antara sektor publik dan swasta dalam berbagai konteks, termasuk kebijakan publik dan intervensi sektor swasta dalam konteks tersebut.”.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode deskriptif untuk mengukur kualitas. Purposive sampling merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah teknik untuk mengumpulkan informasi melalui kontak pribadi atau cara lain. Dalam hal ini, observer menggunakan teknologi untuk mengamati data, menulis, dan mendokumentasikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Teori Ansell and Gash (Proses Kolaborasi)	Hasil Analisa data	Aktor kolaborasi
1	Trust building	Terjalannya kepercayaan yang baik dengan komunikasi	- Pemerintah - Masyarakat - Swasta
2	Commitment to process	Komitmen yang terjalin baik dengan koordinasi	- Pemerintah - Masyarakat - Swasta
3	Shared understanding	Memahami tujuan bersama	- Pemerintah - Masyarakat - Swasta

4	Intermediate outcomes	Mempunyai perencanaan strategik dengan kesuksesan sederhana	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Masyarakat - Swasta
5	Face to face dialogue	Terlaksananya negosiasi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Masyarakat - Swasta

Menurut teori pembangunan kepercayaan Ansell dan Gash, kerjasama dan kolaborasi stunting di Kabupaten Ciamis masih kuat dan terus didasarkan pada parameter keberhasilan dimensi 1 Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang strategi stunting nasional, koordinasi strategi stunting, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. demikian pula, pembiayaan Namun, teori stunting dapat ditemukan dalam kewenangan didinas.

Menurut teori Ansell dan Gash, "Komitmen II untuk berproses" sebagai sarana pencegahan stunting di Kabupaten Ciamis didasarkan pada konsistensi tim dan tim dalam proses mengembangkan strategi kooperatif dan menggunakannya untuk mencapai hasil yang sukses. Terjalannya komitmen pencegahan hambatan di Kabupaten Ciamis sudah bagus karena setiap Instansi berkomitmen untuk mencegah hambatan dengan kegiatan delapan aksi konvergensi hambatan yang telah dilaksanakan. Delapan aksi tersebut di atas memuat tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus diperbaiki oleh satu lembaga.

Selain itu, menurut definisi Teori Ansell dan Gash tentang "Shared Understanding" terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Ciamis. Kolaborasi antara para pemangku kepentingan tentunya memiliki sepemahaman yang terjalin dengan baik apabila dilandasi oleh adanya suatu visi dan misi bersama. Dalam hal stunting untuk individu dan masyarakat umum, ada beberapa strategi berbeda yang digunakan, dengan tujuan untuk membuat lompatan ski sedekat mungkin dengan keterlibatan yang terbaik.

Menurut teori Ansell dan Gash, ukuran 1V Intermediate Outcome merupakan faktor terpenting dalam menentukan tingkat stunting di Kabupaten Ciamis. Kolaborasi dapat terjadi ketika sifat tujuan dan penggunaan jenis kegiatan yang berbeda dapat diidentifikasi dan digunakan pada pagi hari dekat dan merupakan indikator dari jangka panjang yang sama-sama ada.

Kemudian menurut Teori Ansell dan Gash dimensi V tentang *Face to Face dialogue* menjadi penentu keberhasilan pada pencegahan yang menghalangi di Kabupaten Ciamis. Interaksi terjadi dalam pengaturan tatap muka karena informasi digunakan untuk membuat keputusan, dan pengaturan ini berfungsi sebagai panduan untuk membangun konsensus dan mencapai tujuan dalam proses kolaboratif, serta untuk mengidentifikasi individu dan kelompok dalam organisasi.

Tujuan Kabupaten Ciamis adalah untuk mengatasi salah satu hambatan stunting yaitu sektor publik dan swasta, sedangkan sektor swasta merupakan satu-satunya yang berpeluang berhasil. Organisasi Musyawarah Masyarakat (OPD) yang bertugas berunding dengan TPPS terwakili dalam putaran kedua konvergensi stunting, yaitu hilangnya rembuk stunting. Selain itu, anggota panitia SKPD membahas topik seperti lokus stunting, cakup, kegiatan-kegiatan yang sebaiknya digunakan untuk stunting, rencana kegiatannya, dan apa yang harus dilakukan jika ada anggaran yang harus digunakan untuk stunting di Kabupaten Ciamis.

KESIMPULAN

Sebagai hasil dari tata kelola kolaboratif pada komite stunting di Kabupaten Ciamis, keputusan komite untuk menerapkan tata kelola kolaboratif pada komite stunting disetujui oleh ketua Kabupaten Ciamis. Terlihat bahwa teori kolaboratif tata kelola stunting di Kabupaten Ciamis dari Ansell dan Gash telah divalidasi dan diterapkan pada proses tata kelola kolaboratif stunting di Kabupaten Ciamis, menggunakan proses 5 (lima) dimensi.

Tujuan pembangunan kepercayaan adalah untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan, anggota masyarakat, dan anggota swasta, meskipun hal ini tidak selalu memungkinkan. Komitmen terhadap proses yang bertujuan untuk mempererat kerja sama tim yang terjalin antara masyarakat, swasta, dan swasta, dicontohkan oleh organisasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap hari dan memiliki dampak terbesar pada produktivitas swasta. Memiliki kesamaan pemahaman, memahami visi dan misi adalah sama baik bagi lembaga maupun proses pendidikan. Proses pendidikan di Kabupaten Ciamis didasarkan pada aksi konvergensi pengerdilan (delapan) ke-8, namun proses pendidikan ada di lembaga lain. Untuk mencapai hasil antara, kombinasi dari faktor-faktor yang disebut sebagai faktor "pendukung" dan faktor "penghambat" harus digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam hubungannya dengan penerapan strategi. Terkait dengan program stunting Kabupaten Ciamis, faktor yang disebut "pendukung" dapat digunakan untuk menyoroti kegunaan program. Alasannya, stunting tidak sering terjadi dalam konteks situasi tersebut, namun dapat digunakan untuk mengurangi stunting dan aktivitas serius lainnya. percakapan tatap muka. Ada berbagai kerugian yang terkait dengan rembuk stunting dan kerugian kegiatan yang dapat ditemukan dalam dimensi keberhasilan terkait negosiasi. Namun, jika tidak demikian, tidak akan ada kombinasi yang optimal dengan pihak swasta

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance*. CV Budi Utama.
- Silalahi, U. (2019). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algensindo.
- Waluyo. (2007). *Manajemen publik*. cv mandar maju.